

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SILEANG  
KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Rusli Roganda Sihite  
Npm 198510019**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SILEANG  
KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**



**OLEH:  
Rusli Roganda Sihite  
198510019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

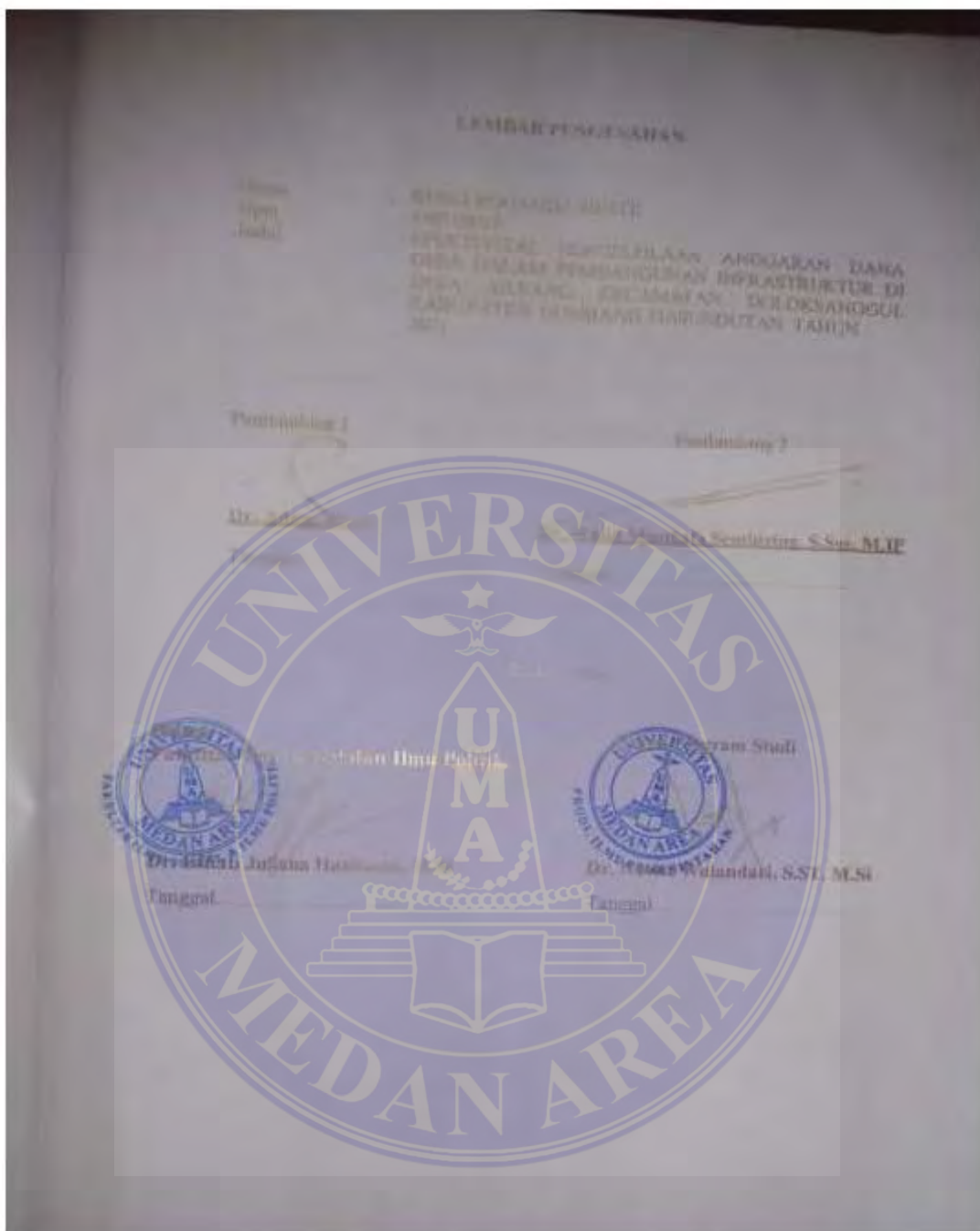
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

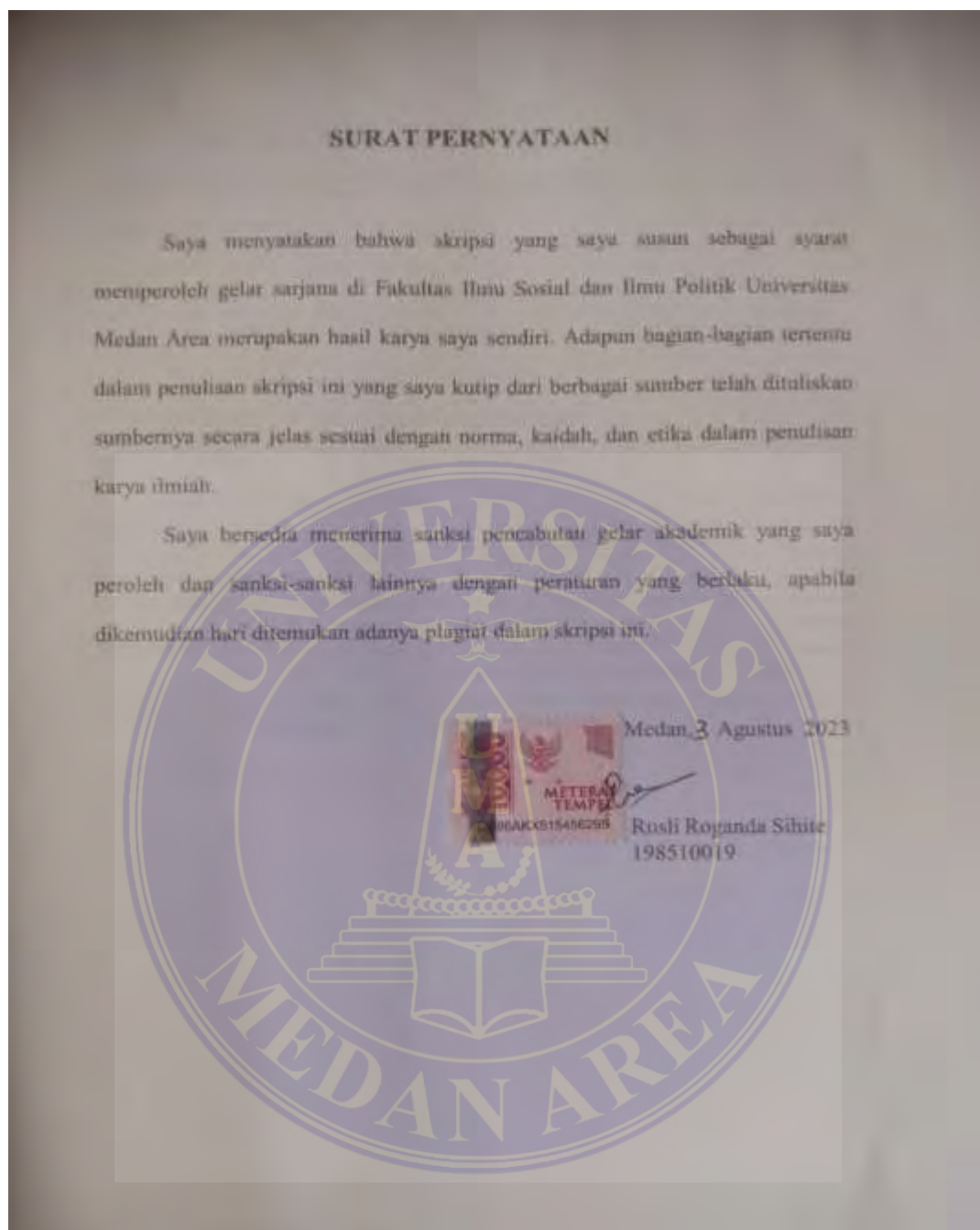
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

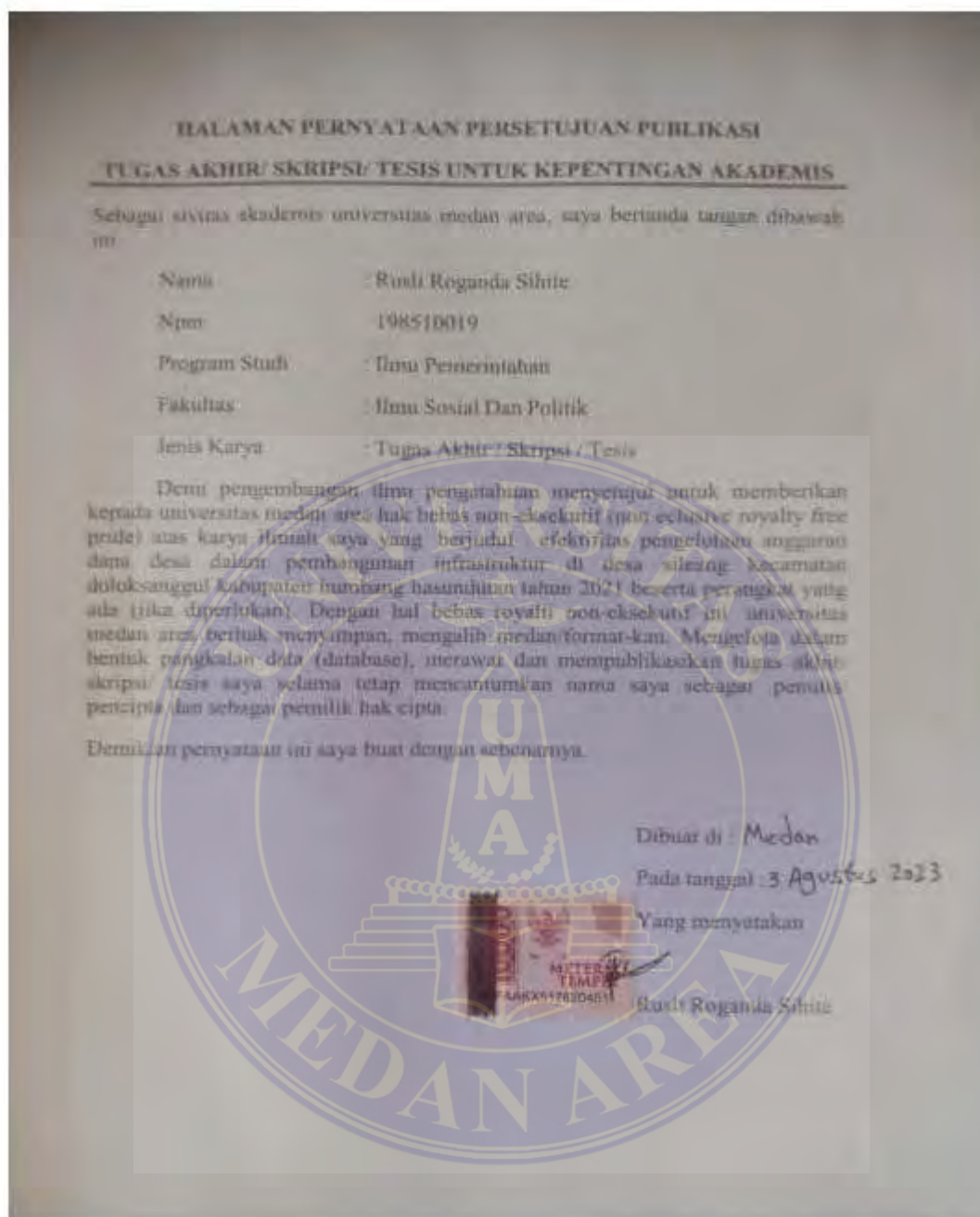
Document Accepted 31/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23









## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat Efektivitas pengelolaan Anggaran Dana Desa yaitu untuk melihat peningkatan pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan tehnik analisis data menurut miles dan huberman dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala desa dan informan utama adalah kaur pembangunan serta informan tambahan adalah empat orang masyarakat Desa Sileang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa tahun 2021 belum berjalan efektif, dapat dilihat dari dimensi yang menjadi alat ukur masih terdapat dimensi yang berjalan sepenuhnya. Mulai dari kurang efektifnya pelaksanaan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem pendanaan, minimnya sumber anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga terbatasnya program pembangunan yang dilaksanakan, segi perencanaan pembangunan yang kurang matang, dalam pelaksanaan sosialisasi masyarakat yang terlibat harus dibatasi karena pandemik covid-19, masih ada aparat desa yang tidak partisipatif dalam pengelolaan dana desa, serta sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur di desa sileang belum memadai. Upaya yang dapat dilakukan Untuk mengatasi hambatan dan kendala mengenai penyelenggaraan pemerintah desa Sileang. Hendaknya pemerintah dapat berupaya melakukan koordinasi antar wilayah/dusun secara optimal agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan dengan mengikuti musyawarah secara aktif, dan juga melakukan sosialisasi program yang telah dirumuskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Serta harus juga dapat menjalin komunikasi terbuka dengan melakukan komunikasi antara pemerintah desa serta pemerintah dengan masyarakat.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Anggaran, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur**

## ABSTRACT

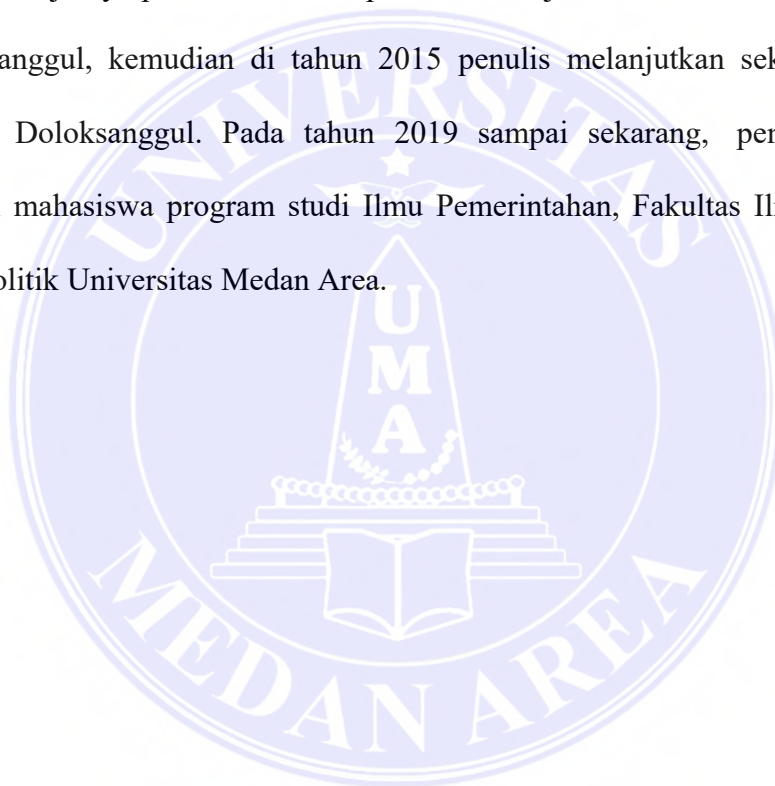
*This research was conducted to see the effectiveness of managing the Village Fund Budget, namely to see an increase in village infrastructure development in Sileang Village, Doloksanggul District, Humbang Hasundutan Regency. Based on the problems studied, the method and type of research used descriptive qualitative research. Using data analysis techniques according to Miles and Huberman with interview data collection techniques and documentation, the key informants in this study were the village heads and the main informants were development heads and additional informants were four people from Sileang Village. The results of the research show that the management of the Village Fund Budget in the development of village infrastructure in 2021 has not been running effectively, it can be seen from the dimensions that are used as measuring instruments, there are still dimensions that are fully operational. Starting from the ineffective implementation of the planning coordination mechanism and funding system, the lack of budgetary resources owned by the village government so that the limited development programs implemented, the lack of maturity in terms of development planning, in the implementation of socialization the community involved must be limited due to the Covid-19 pandemic, there are still village officials who are not participatory in managing village funds, as well as facilities and infrastructure for infrastructure development in Sileang village are not yet adequate. Efforts that can be made to overcome obstacles and obstacles regarding the implementation of Sileang village government. The government should try to coordinate between regions/hamlets optimally so that unwanted problems do not occur, increase public awareness of development by actively participating in deliberations, and also conduct socialization of programs that have been formulated to the community so that people are more aware of the program. development carried out. And must also be able to establish open communication by communicating between the village government and the government with the community.*

**Keywords : Effectiveness, Budget Management, Village funds, Infrastructure Development**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rusli Roganda Sihite, anak dari Bapak Ranap Marhusa Sihite dan Ibu Rama Manalu. Lahir di Desa Sileang, 26 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke 3 (Tiga ) dari 3 (Tiga ) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 173406 Sileang. pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Doloksanggul, kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMK Trisula Doloksanggul. Pada tahun 2019 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



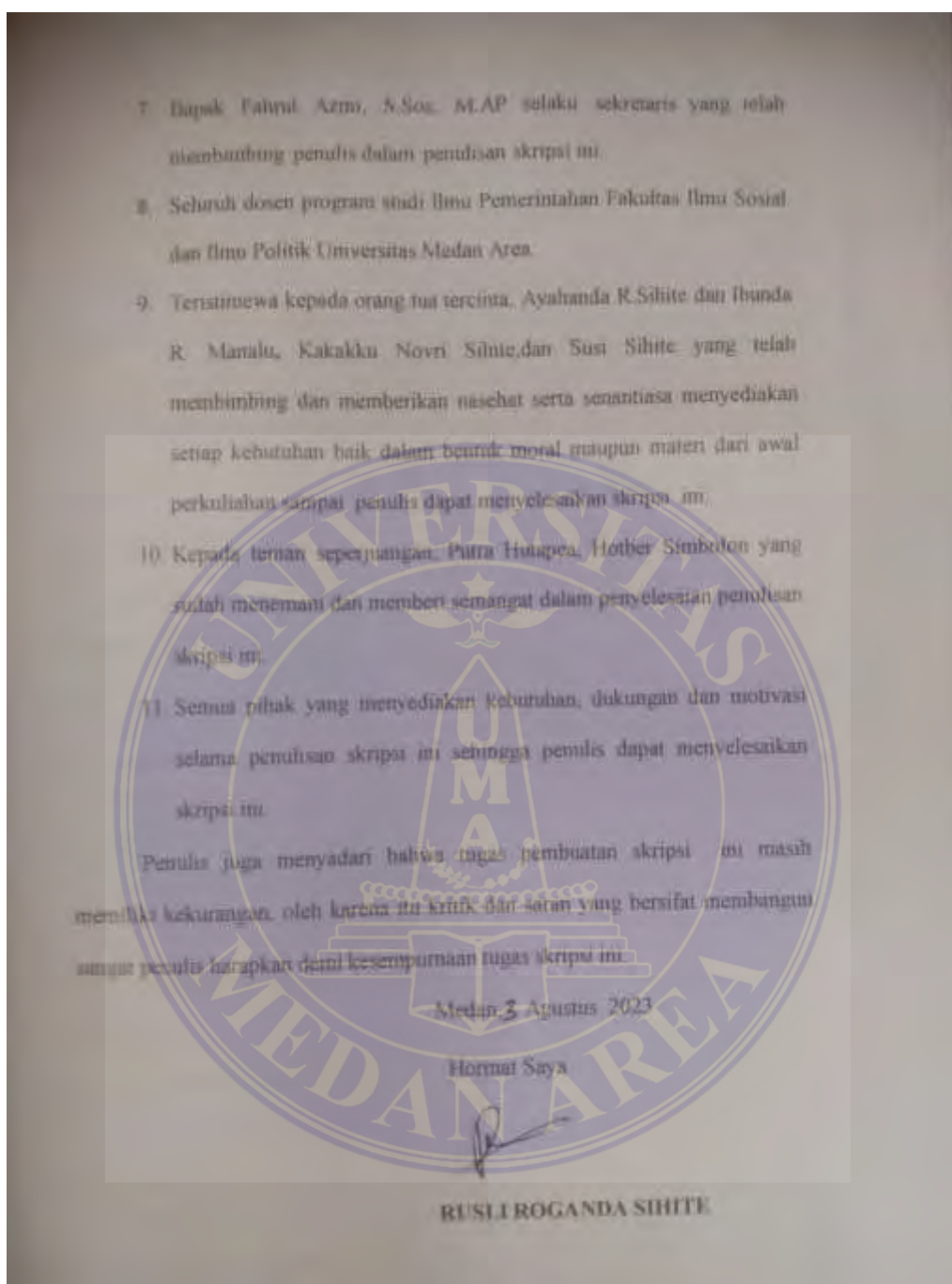


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam skripsi ini “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang hasundutan Tahun 2021

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan maupun material. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.M.Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Jullana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Adam, MAP selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiv
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
2.1. Efektivitas .....	7
2.1.1. Pengertian Efektivitas .....	7
2.1.2. Ukuran Efektivitas .....	9
2.2. Pengelolaan Anggaran Desa.....	11
2.2.1 Defenisi Pengelolaan Anggaran Desa .....	11
2.2.2 Fungsi Anggaran Desa .....	12
2.2.3 Jenis- jenis Anggaran.....	12
2.2.4 Siklus anggaran Dana Desa.....	13

2.3. Dana Desa .....	14
2.4. Pembangunan Infrastruktur .....	16
2.5. Desa.....	23
2.6. Penelitian Terdahulu .....	25
2.7. Kerangka Berpikir .....	26

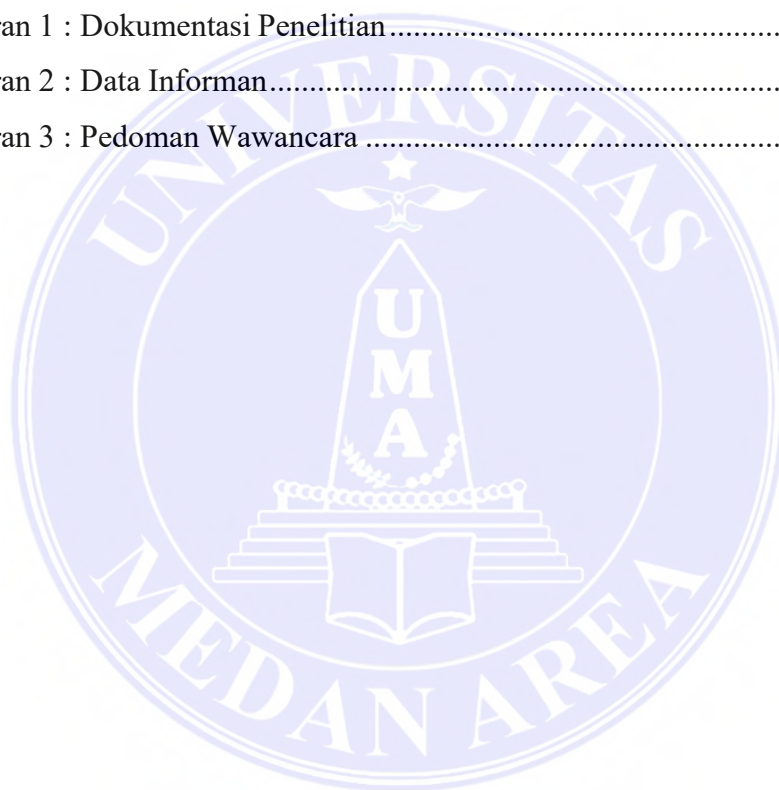
### **BAB III METODE PENELITIAN .....**

3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Informan Penelitian .....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.4. Teknik Analisis Data .....	31
3.5. Lokasi Dan Jadwal Penelitian .....	33
3.6. Defenisi Konseptual Dan Operasional.....	36
3.6.1 Defenisi Konseptual .....	36
3.6.2 Defenisi Operasional .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**

4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.2 Visi Misi Pemerintahan Desa Sileang .....	41
4.1.3 Kondisi Geografis .....	42
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi.....	43
4.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana .....	45
4.1.6 Struktur Organisasi Desa Sileang.....	46
4.2. Pembahasan.....	48
4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.....	48
4.2.2 Faktor Pengambat dan Pendukung Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan .....	58

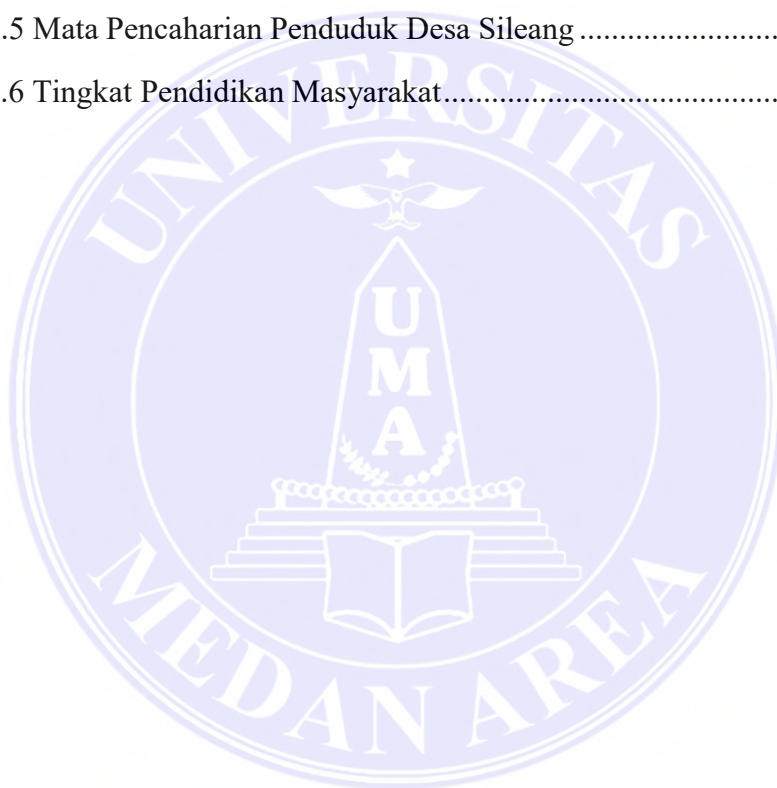
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	68
Lampiran 2 : Data Informan.....	76
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	78





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	31
Tabel 4.1 Kepemimpinan Kepala Desa .....	41
Tabel 4.2 Tata guna Tanah .....	42
Tabel 4.3 Jumlah Perkampungan .....	42
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tiap Dusun .....	43
Tabel 4.5 Mata Pencarian Penduduk Desa Sileang .....	44
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	45



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	27
Bagan 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles Dan Huberman.....	36
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sileang.....	46



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar penyelenggaraan menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang disebut dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai tempat penyimpanan uang negara dan telah ditetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. Kemudian ditransfer Anggaran Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa ke daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Selanjutnya desa menerima transfer dari daerah melalui Rekening Kas Desa (RKD) yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan uang untuk penerimaan dana dari daerah dan membayar seluruh pengeluaran desa dan harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa tersebut.

Anggaran dana desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa pada prinsipnya mengacu pada pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014), setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan

harus didasari adanya akuntabilitas ataupun pertanggung jawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan Dana Desa dan terkendalinya penyaluran Dana Desa. Pemerintahan pada era Jokowi Widodo memiliki Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa kurang diperhatikan oleh pemerintah di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam membangun infrastruktur. Menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai penunjang tercapainya kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara peningkatan pembangunan.

Menurut Siagian (2005:4) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi

masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal yang ingin dicapai dalam pembangunan pedesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan pedesaan jangka pendek adalah peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dapat dikatakan pembangunan pedesaan ditujukan untuk menciptakan kawasan pedesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Desa Sileang terletak di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk 1850 jiwa, luas wilayah 1750 m<sup>2</sup>. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Hasil petani yang terus meningkat tidak didukung dengan kondisi jalan yang baik, di mana jalan yang dilalui untuk membawa hasil petani menjadi penghambat perputaran ekonomi di Sileang. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa lambatnya pelaksanaan pembangunan jalan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan di ladang atau perkebunannya.



Di Desa Sileang, pelaksanaan anggaran dana desa diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah dana desa oleh Kepala Desa dan aparat desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan APBD yang dihasilkan dari proses Musrembang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksud karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Adapun pengorganisasian dalam dana desa adalah untuk membagi tugas dan tanggung jawab aparatur desa, sehingga setiap aparatur dapat bertanggung jawab atas program yang dibiayai oleh anggaran dana desa, sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan untuk seluruh perencanaan yang sudah ditetapkan baik pembangunan dan lainnya menggunakan anggaran dana desa secara tepat sasaran, serta pengawasan pengelolaan anggaran dana desa tujuannya agar anggaran sesuai dengan yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyelewengan dana desa.

Selanjutnya, pembangunan di Desa Sileang dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan agar proses pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Marudut Sihite ( Masyarakat Desa Sileang Dusun 1). mengatakan bahwa pembangunan di Desa Sileang justru tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya persediaan dana yang diperlukan sehingga pembangunan berhenti sementara waktu, hal ini terjadi dengan realita kondisi infrastruktur

yang ada dilapangan. Dengan adanya pernyataan ini sehingga timbul keraguan terhadap kemampuan desa untuk mengelola alokasi dana desa tersebut masih dipertanyakan.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas dan untuk mengetahui lebih dalam maka penulis membuat judul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021.”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sileang.
2. Menambah referensi bahan kajian penelitian lainnya dibidang pembangunan desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat.

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam peningkatan pembangunan Infrastruktur desa di Desa
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian.
3. Bagi instansi tempat penelitian, sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Sileang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Efektivitas

##### 2.1.1 Definisi Efektivitas

Secara etimologis, kata efektivitas berasal dari kata “*Effective*”, yang berarti sukses dalam kata bahasa Inggris “*Effectiveness*”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah kegunaan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan. Seseorang yang melakukan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan Definisi efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Adapun target perbedaan dari kedua kalimat tersebut dari segi efisien bagaimana kita melakukan sesuatu menggunakan daya sehemat mungkin sedangkan efektif bagaimana cara kita mengarahkan pekerjaan untuk sesuai pada target.

Beberapa pakar mengemukakan Definisi tentang efektivitas. Menurut Gibson dikutip dari buku Herbani Pasolong (2012:51) efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Kumorotomo (2005:362) efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif jikalau tujuan dari organisasi atau nilai-nilai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi tercapai. Menurut Siagian (2002:151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Kurniawan dalam bukunya yang berjudul transformasi pelayanan publik (2005) menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan

atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Definisi tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Surmayadi (2005:105), organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan opratif dan oprasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi:2013:6).

Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan ” (Effendy, 2003 : 14). Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam

Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam



jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Pendapat para pakar di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

### 2.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Steers (2020: 6) menyatakan, “Efektivitas dapat dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi yang layak dicapai”. Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan rencana untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Konsep efektivitas yang di kemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian peserta program.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan tingkat keefektifan dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi.

Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005:53) dalam buku efektivitas organisasi mengatakan mengenai ukuran efektivitasnya, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahap, baik dalam arti tahap pencapaian bagian-bagiannya maupun tahap dalam waktu tertentu. Pencapaian tujuan terdiri dari berbagai faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu gunakannya tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat pendekatan efektivitas menurut beberapa ahli mengenai

pendekatan yang dapat di pergunakan dalam mengukur keefektivitasan program pemerintah desa antara lain:

- a. Menurut Gibson, Doneli dan Ivan Cefich (1989:25), mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. (Gibson, Doneli, dan Ivan Cefich, Teori Efektivitas).
- b. Menurut Robbins (2008:29), membagi ke dalam 4 pendekatan dalam mengukur efektivitas pemerintahan desa yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi – strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Definisi efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

## **2.2. Pengelolaan Anggaran Desa**

### **2.2.1 Definisi Pengelolaan Anggaran Desa**

Anggaran (*budgeting*) ialah menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana. “Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.”

Pembuatan anggaran dalam organisasi sector publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya lebih relatif kecil. Bagi organisasi sector publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

## 2.2.2 Fungsi Anggaran Desa

Beberapa yang menjadi fungsi anggaran desa yaitu:

1. Fungsi Otorisasi : APBD menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan : APBD merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan: APBD menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian desa.
5. Fungsi Distribusi : kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
6. Fungsi Akuntabilitas : APBD member landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

## 2.2.3. Jenis-jenis Anggaran

Secara garis besar anggaran dapat diklarifikasikan menjadi berikut:

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*current vs capital budgets*).

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran modal digunakan untuk merencanakan kebutuhan dan

menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi atau aset. Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan jumlah aset atau kekayaan organisasi sector publik yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.

2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*tentative enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran *tentative* dan anggaran *enacted*. Anggaran *tentative* adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

### 2.2.4 Siklus anggaran Desa

Pembuatan anggaran adalah suatu proses yang berkelanjutan. Pada organisasi sektor publik pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahap:

1. Persiapan (*preparation*): Pada tahap persiapan, bagian anggaran, bagian menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di review dan diadakan pendapat semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh pemerintah.



2. Persetujuan Lembaga Legislatif (*legislative enactment*) : Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapat persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna mendapatkan pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengan pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.
3. Administrasi (*administration*) : Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi
4. Pelaporan (*reporting*) : Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang terpisahkan ini dilakukan pada proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.
5. Pemeriksaan (*pot-audit*) : Kemudian laporan yang akan diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan anggaran akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan pada periode berikutnya.

### 2.3 Dana Desa

Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintaha, pelaksanaan, pemabangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa

## 2.4 Pembangunan Infrastruktur

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan Pancasila (Fandi: 2014).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi Definisi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah atau dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti apabila perencanaan yang dibuat pemerintah haruslah dikelola dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa melalui pembangunan infrastruktur yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat. (Ritonga:2019).

Fakih (2001:10) mengatakan pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Membangun masyarakat berarti memempukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Safi'i (2007) mengatakan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan modernisasi. Modernisasi adalah

salah satu bentuk perubahan sosial yang diharapkan terjadi. Dalam perspektif modernisasi, pembangunan dianggap sebagai sarana menuju kehidupan yang ditinggalkan aspek tradisionalisme suatu masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang berlangsung terus menerus di Indonesia, pembangunan desa di seluruh wilayah nusantara berorientasi pada hasil yaitu menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam merealisasikan pembangunan nasional yang pada tahun 2017 bertitik fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, pemerintah dalam hal ini melakukan estafet pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Hasil dari pembangunan desa yang terlaksana dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek-proyek tersebut.

Menurut Todaro (2000:28), Pembangunan merupakan suatu kekayaan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang lebih baik”.

Pembangunan desa merupakan suatu program nasional yang dimulai sejak dulu hingga sekarang yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dilaksanakan meliputi berbagai bidang, disusun dalam program-program dan proyek proyek pembangunan. Penjabaran dari berbagai program dan proyek, dapat dirinci ke dalam kelompok program dan proyek, sebagai berikut:

1. Pembangunan di bidang pertanian secara berkelanjutan.
2. Konservasi lingkungan.
3. Pembangunan industri pedesaan.
4. Pembangunan sumber daya manusia (SDM).



5. Pembangunan infrastruktur fisik.
6. Pembangunan kelembagaan ekonomi dan sosial.
7. Pembangunan partisipasi masyarakat.

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Adisasmita (2006) mengatakan pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, secara berdaya guna dan berhasil guna di setiap dan di seluruh kawasan pedesaan. Pembangunan desa harus benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi desa serta bertumpu pada strategi dasar tipologi pembangunan serta ditujukan pada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan wawasan nusantara.

Pembangunan pedesaan tersebar ke seluruh daerah, ternyata lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kurang diimbangi kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Dalam pembangunan pedesaan dihadapi banyak sekali hambatan diantaranya yang paling mendesak yaitu (Adisasmita, 2006):

1. Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, antar pelaku pembangunan.
2. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan pedesaan.



4. Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

Menurut Adisasmita (2006) meskipun problematika dalam pembangunan pedesaan banyak mengalami hambatan-hambatan, pembangunan pedesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan dan lingkungan pemukiman).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap daerah pedesaan miskin).
5. Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan.

Secara umum pembangunan pedesaan haruslah dimulai dari sarana dan prasarana dalam hal ini infrastruktur sebagai akses utama dari segala bentuk kegiatan harus dibangun, sehingga yang menjadi orientasi pemerintah dapat terealisasi dengan baik dan sesuai tujuan pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan nasional, pedesaan mempunyai peranan penting karena mencakup bagian terbesar di wilayah nusantara. Infrastruktur desa merupakan salah satu bagian integral desa yang harus dimiliki suatu desa, tanpa adanya suatu infrastruktur desa maka suatu desa akan sulit untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Disamping itu, infrastruktur di kawasan pedesaan haruslah serasi dan terpadu, dan bermanfaat di seluruh kawasan pedesaan. Dengan demikian segala akses yang memicu perkembangan potensi suatu kawasan pedesaan akan berjalan ke arah yang lebih baik.

Selama ini kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedalaman, termasuk para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung terhadap pengembangan industri, baik besar, menengah maupun industri kecil yang menyebabkan para pelaku ekonomi (pengusaha) malas untuk mengembangkan usahanya bahkan sudah sebagian yang memutuskan untuk menghentikan produksinya sehingga menciptakan pengangguran baru (Sumarto, 2010).

Sumarto (2010) juga mengatakan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan. Bila kondisi infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya jelek maka jangan berharap pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai harapan.

Infrastruktur pedesaan memiliki peranan sangat penting dalam suatu perekonomian, selain itu infrastruktur yang merupakan akses dalam semua kegiatan di setiap daerah harus bisa menjembatani setiap aktivitas perekonomian di suatu daerah khususnya wilayah pedesaan. Keterkaitan antara infrastruktur terhadap tingkat kesejahteraan suatu desa dapat dilihat dari sejauh mana keadaan infrastruktur wilayah pedesaan tersebut, apabila infrastruktur di wilayah pedesaan benar-benar efektif keberadaannya maka hal ini akan dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup baik.

Semua desa dianggap sama, pendekatan infrastrukturnya. Harus dibangun juga sumber daya manusianya. Bahkan seringkali terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan desa satu dengan yang lainnya jangan dipikiul rata. (Kompas.com 2017).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. The World Bank dalam Prasetyo dan Firdaus (2009) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, public utilities berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sanitasi dan public work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.
2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan pengorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sector publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (Wikipedia, 2018). Istilah infrastruktur ini lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengelolaan limbah, bandara, waduk, tanggul, kanal, kereta api secara fungsional dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Seperti adanya jalan yang baik di suatu negara maka dapat memperlancar transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik sesuai tujuan. Maka ini disebut infrastruktur yang disediakan pemerintah disebut barang publik, selain itu seperti jalan tol merupakan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah (Stiglitz dalam Hapsari, 2011). Adapun ciri-ciri barang publik menurut penggunaannya (konsumsi barang publik) berupa non rivalry dan nonexcludable rivalry. Namun hal ini dapat memiliki sifat persaingan (rivalitas)

dalam penggunaannya jika barang yang digunakan seseorang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Maka dapat dikatakan barang publik sebenarnya adalah jika seseorang menggunakan barang yang tidak ada persaingan serta orang lain juga dapat menggunakan barang tersebut. Jika kondisi ini sebaliknya, seseorang tidak bisa menahan orang lain menggunakannya bersama-sama maka barang tersebut tetap dianggap sebagai barang publik. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangat penting mengingat bahwa sebagai tanda pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Selain itu, infrastruktur juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan wilayah karena ini ciri dari laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika suatu daerah memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik maka akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik dan sebaliknya. Hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur sangatlah penting dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Kwik Kian Gie dalam Chaerunnisa, 2014).

Tersedianya infrastruktur suatu negara maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu negara sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Namun disisi lain ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, Yanuar dalam Purnomo (2009) menyatakan bahwa adanya dua kendala dalam pengadaan infrastruktur, yaitu kemungkinan ada kegagalan pasar (market failure) dan pembiayaan. Kegagalan pasar ini dikarenakan jenis infrastruktur memiliki manfaat yang tidak hanya dirasakan secara pribadi namun juga dapat dirasakan oleh orang lain.

Jadi infrastruktur sudah menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar fisik untuk jaminan



ekonomi dalam bentuk layanan kepada masyarakat baik dari sektor publik maupun privat untuk kesejahteraan, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat serta perkembangan wilayah menjadi yang lebih baik jika infrastruktur kurang memadai maka akan terjadi masalah dan penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

## 2.5 Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Harman Warner Muntinge, seorang anggota Belanda dari kolonial Inggris Lard van Indie, yang merupakan asisten gubernur Inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Dalam sebuah laporannya kepada pemerintah tertanggal 14 Juli 1817 menyatakan bahwa ada desa-desa di wilayah di pantai utara Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetarjo, 1984).

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India, “Swadesi”. Artinya tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang didiami oleh, dan mengacu pada satu kesatuan kehidupan dengan kriteria yang seragam dan batas-batas yang jelas (Soetardjo, 1984: dalam Yuliati, 2003). Menurut definisi tersebut, Indonesia memiliki banyak kesatuan masyarakat dengan istilahnya masing-masing, seperti Dusun dan Marga untuk masyarakat Sumatera Selatan, Dati dari Maluku, Nagari dari Minan, dan Wanua dari Minahasa. Di Aceh desa disebut dengan nama gampong. Di daerah lain, masyarakat setingkat desa juga memiliki konsep dan keunikan yang berbeda baik dari segi mata pencaharian maupun adat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.



Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikat Negara untuk mengotonomikan Desa dengan berbagai kemandirian pemerintah desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan berbagai kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, penyebab daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau Kota, dan Desa. Revormasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun di ramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Definisi Desa menurut Widjaja dan UU tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan

suatu kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arlis, (2020)	Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar	Kualitatif dengan tipe deskriptif.	Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup efektif hal ini dapat di lihat dari pencapaian tujuan di mana dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagian besar telah mencapai tujuan sesuai yang di tentukan mulai dari kurun waktu dalam aspek pelaksanaan pembangunan di desa tompotana hanya memerlukan waktu kurang lebih satu tahun pelaksanaan serta dari aspek sasaran juga telah mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya serta sudah di rasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun masih ada beberapa keluarga yang masih perlu di berikan bantuan pembangunan .dari aspek integrasi kepala desa juga selalu memberikan arahan dan menyampaikan kepada setiap kepala dusun untuk selalu berusaha menyukseskan pembangunan khususnya di dusun masing-masing, kepala desa juga selalu berkoordinasi kepada kepala dusun dan juga masyarakat kemudian bentuk adaptasi yang di lakukan kepala desa yaitu dari setiap pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa Tompotana.
2	Irfan, (2019)	Peran pemerintah desa dalam pembangunan di desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi	Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	(1) Terdapat tiga peran pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di antaranya: partisipasi, transparansi, dan kesetaraan dan kewajaran; (2) Terdapat dua kendala pemerintah dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya SDM yang memadai; (3) Terdapat tiga solusi dalam pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di antaranya: peningkatan disiplin kerja, mengikuti pelatihan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

3	Nirwana, (2015)	Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar	Kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para informan.	Pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
---	-----------------	--	---	--

Sumber: data diolah, 2023

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu persamaan dalam penelitian adalah Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang pembangunan infrastruktur dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian yang teliti dengan penelitian terdahulu yaitu Lokasi penelitian dan penelitian ini berfokus pada Anggaran Dana Desa di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

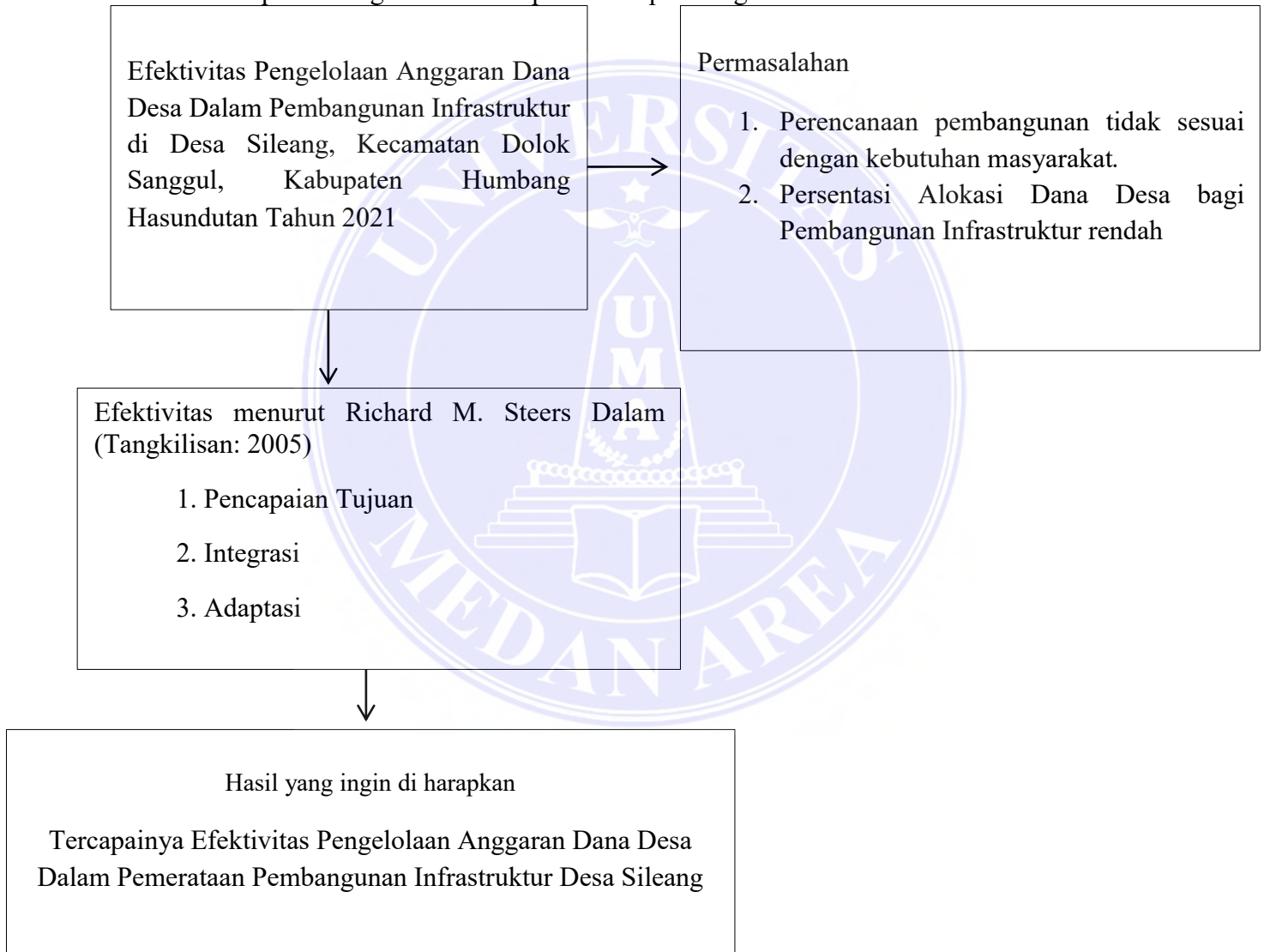
## 2.7 Kerangka Berfikir

Desa Sileang adalah salah satu desa yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara. Pembangunan infrastruktur Desa Sileang yang alokasi anggarannya berasal dari dana desa menyelesaikan beberapa pembangunan jalan untuk mengakses ladang atau perkebunan masyarakat. Namun peneliti sekaligus warga Desa Sileang melihat bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak selesai dengan cepat atau lambat.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Sileang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara masalah penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Strees dalam Tangkilisan (2005) yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Memaksimalkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan berikut:



**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan gambar 2.1. Kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa, pada Pemerintah Desa Sileang terdapat beberapa poin permasalahan diantaranya: (1) perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) Persentasi Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur rendah, Peneliti menggunakan Teori Efektivitas menurut Richard M. Streers dalam ( Tangkilisan : 2005), terdapat 3 indikator yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, (3) Adaptasi. Output yang ingin dicapai dari hasil penelitian berupa Tercapainya Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Menurut Patton dalam Ahmadi (2014:15), metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dengan keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep tersebut lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yaitu data alamiah diperoleh dari hasil langsung yang berasal dari subjek peneliti. Dan data kualitatif merupakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan beberapa pertanyaan oleh peneliti.

Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pendekatan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. "Penelitian juga memiliki rancangan penelitian yang spesifik. Rancangan ini utamanya terkait dengan pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian, tetapi tetap berasal dari berbagai disiplin dan terus berkembang dinamis sepanjang proses penelitian.

### 3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Sileang beralamat Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadwal penelitian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2022				2023						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal	■	■									
2	Seminar Proposal	■	■									
3	Penelitian			■	■							
4	Pengumpulan Data			■	■							
5	Seminar Hasil					■	■	■				
6	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi					■	■	■				
7	Sidang Skripsi							■				
8	Wisuda											■

Table 3.1 lokasi dan jadwal penelitian

### 3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena peneliti kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sileang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu Nonprobability Sampling yang mengacu pada Purposive Sampling. Adapun Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti . yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan Kunci : Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sileang ( Parluhutan Sihite).
- b. Informan Utama : Peneliti menggunakan informan utama yaitu kaur pembangunan desa Sileang ( Marusaha Sihite ).
- c. Informan Tambahan : Peneliti menggunakan informan tambahan 2 kepala dusun yaitu 1. Lesko Sihite, 2. Bertoni A Sihite, dan 4 masyarakat umum yaitu : Rejeki Simanullang, Marolop Sihite, Marudut Sihite, Rumondang Silaban.

Tabel 3.2  
Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2	Kaur Pembangunan	1	Informan Utama
3	Kepala Dusun	2	Informan Utama
4	Masyarakat	4	Informan Pendukung
<b>Total</b>		<b>8</b>	

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua oran, pewawancara sebagai yang

mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”, (Moleong, 2007). Langkah awal dalam proses wawancara yaitu, memberitahu topik atau tema yang akan di bahas pada saat wawancara, setelah itu pihak instansi menentukan narasumber yang akan di wawancarai, kemudian penulis menyediakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, setelah proses wawancara berlangsung penulis menulis jawaban yang sudah disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, setelah mendapatkan jawaban atau informasi yang disampaikan dari narasumber dan proses wawancara telah selesai, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada instansi yang terkait hingga kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan informasi kepada penulis.

- b. Observasi, Menurut pendapat Sugiyono (2012), observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur.

Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara. Secara sederhana observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung kelokasi penelitian. langkah yang pertama kali dilakukan dalam teknik observasi ini adalah, datang ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sileang.

- c. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian.

“Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, (Burhan, 2008). Teknik pengumpulan data dalam metode dokumentasi sering di contoh kan seperti dengan Foto-foto baik dalam acara tertentu maupun dalam penelitian. Namun perlu di cermati bahwa yang dimaksud dokumentasi tidak hanya foto-foto saja diantaranya, gambar, tulisan, buku, monografi, dan dokumen.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Langkah yang pertama kali dilakukan oleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah, foto bersama dengan sejumlah narasumber yang bersangkutan hingga mengambil foto-foto di instansi sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Saat



mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Peneliti harus sabar untuk berjalan dari rumah ke rumah, atau mendatangi instansi tertentu untuk mengadakan wawancara atau membagi kuesioner. Jika seseorang peneliti tidak memiliki mental yang kuat, ia akan mudah putus asa dan gagal.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

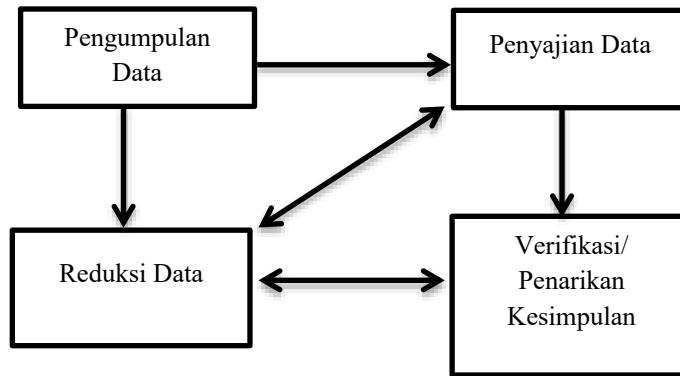
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

### 3. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 3.1 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.

### 3.6 Defenisi Konseptual Dan Operasional

#### 3.6.1 Defenisi Konseptual

Defenisi Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33).

##### 1. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD, dan APBN.

##### 2. Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDesa)

Anggaran belanja dan pendapatan Desa adalah rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan

perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa.

### 3. Pengalokasian Dana

Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari perhimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam pengalokasian dana pihak perbankan membaginya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini, misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20% sedangkan untuk bidang industry diberikan 40%.

### 4. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan local kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi Desa-Kota, sector kelembagaan Desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

### 5. Konsep Prioritas Penggunaan Dana Desa

Adapun definisi konsep prioritas penggunaan Dana Desa yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

#### a. Pembangunan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

### 3.6.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah operasional kerangka teori yang telah diajukan sebelumnya. Menurut Masri Singarimbun (1989:46), definisi operasional adalah unsur – unsur peneliti yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator – indikator apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari variabel – variabel tersebut.

Melalui definisi dari variabel ini nantinya akan diuraikan indikator-indikator yang sesuai dengan variabel yang digunakan. Adapun definisi operasional variabel tersebut adalah berikut ini:

#### a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



### b. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### c. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

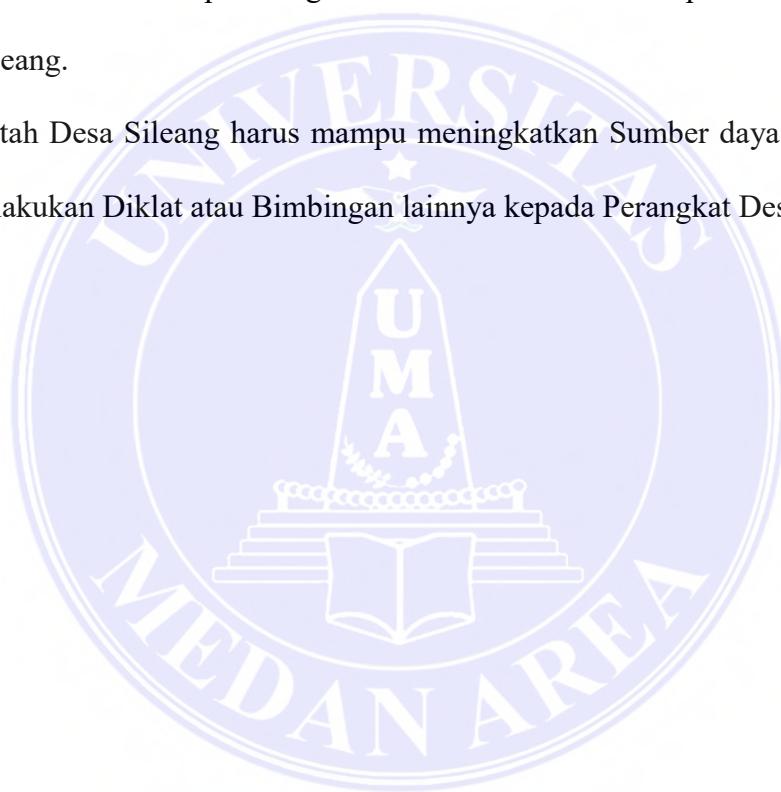
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan maka dapat peneliti uraikan:

1. Bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis teori menurut Richard M Steers dalam tangkilisan 2005. Yaitu Pencapaian tujuan, belum terlaksana dengan efektif, Integrasi sudah berjalan dengan baik dan Adaptasi belum terlaksana dengan efektif.
2. Adapun Faktor penghambat Pengelolaan anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya sumber daya manusia . sedangkan faktor pendukung Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Para Penatua desa Sileang selalu aktif pada saat dilakukannya musyawarah Desa.

## 5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran yang ditemukan sebagai bahan masukan kepada Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran adalah:

- 1) Di dalam penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) pemerintah desa harus lebih memprioritaskan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung yang ada Di Desa Sileang.
- 2) Pemerintah Desa Sileang harus mampu meningkatkan Sumber daya manusia dengan cara melakukan Diklat atau Bimbingan lainnya kepada Perangkat Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Pendidikan. Erlangga: Jakarta.
- Cresweel, Jhon. W, 2016. "Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran", Edisi Keempat, Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *KAMUS KOMUNIKASI*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Irfan. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jambi: Fakul
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Pembangunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan
- Nirwana. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P, 1999. "Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya", Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siagian. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Steers, Richard. M. (2020). Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", tas Syariah Universitas Islam Negeri. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Widjaja, H.A.W, 2010. "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa Yang Asli, Bulat Dan Utuh", Edisi Keenam, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Artikel ilmiah :

Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori. JURNAL EKSEKUTIF*

Arlis. 2020. Efektivitas fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Asnawi. 2013. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota (hlm.6). Malang: FISIP, UMM.

Faini, R. N. (2016). EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DESA KEDUNGLUMPANG KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG. *Publika*, 4(7).

Lengkoan, Irma Clara Juliet, Daud M. Liando, and Neni Kumayas. "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung." *GOVERNANCE 2.1* (2022).

Mewengkang, Andrea J., Frans Singkoh, and Stefanus Sampe. "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016." *Governance 1.2* (2021).

Moningka, Shinta Bonita. "Efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan kecamatan tomohon tengah kota tomohon." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik 3.1* (2014).

Rahardjo, M. (2018). Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian.

Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62-70.

Singarimbun, M dan Efendi,. 1995, Metode Penelitian Survey, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

Soputan, C., Rares, J., & Tampi, G. B. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(029).

Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 334. 18 Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Rukayat, Yayat. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi 13.1* (2019).

Hidayah, Anisa, and Wahyu Subadi. "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser." *JAPB 5.1* (2022): 204-214.



Saputra, Yudistira Yola, and Harapan Tua RFS. "Efektivitas Tugas Pembantuan (Hmedebewind) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Program Pertanian)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3.2 (2016): 1-15.

### **Regulasi/ Kebijakan :**

UU Nomer 06 tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

UU Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Dokumen dan Sumber Lainnya:**

Deddi Nordiawan & Ayunigtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2010,



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



**Gambar Kantor Kepala Desa Sileang  
(Sumber. Dokumentasi Pribadi 19 November 2022)**



**Gambar Kepala Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi,14 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan kunci yaitu bapak Parluhutan Sihite Selaku Kepala Desa Sileang ( Senin 14 November 2022 pukul 10: 00)



**Gambar Informan Kunci**

**(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 14 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan utama yaitu bapak Marusaha Sihite Selaku Kaur pembangunan Desa Sileang ( Senin 14 November 2022 pukul 10: 00)





**Gambar Informan tambahan**

**(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 16 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Lesko Sihite Selaku Kepala Dusun Desa Sileang ( Rabu 16 November 2022 pukul 09: 00)





**Gambar Informan tambahan**

**(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 16 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Bertoni A Sihite Selaku Kepala Dusun Desa Sileang ( Rabu, 16 November 2022 pukul 09: 00)



**Gambar Informan tambahan**

**(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 21 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Rejeki Simanullang Selaku Masyarakat Desa Sileang ( Senin, 21 November 2022 pukul 09: 00).



**Gambar Informan tambahan**

**(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 21 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Marolop Sihite Selaku Masyarakat Desa Sileang ( Senin, 21 November 2022 pukul 03: 00).



**Gambar Informan tambahan**

**(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 21 November 2022)**

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Marudut Sihite Selaku Masyarakat Desa Sileang ( Senin, 21 November 2022 pukul 09: 00).



### Gambar Informan tambahan

(Sumber:Dokumentasi Pribadi, 21 November 2022)

Dokumentasi Penelitian setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Rumondang Silaban Selaku Masyarakat Desa Sileang ( Senin, 21 November 2022 pukul 03: 00).

#### Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci  
Nama : Parluhutan Sihite  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 49 Tahun  
Jabatan : Kepala Desa
2. Informan Utama  
Nama : Marusaha Sihite  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Usia : 45 Tahun  
Jabatan : Kaur Pembangunan Desa Sileang
3. Informan Tambahan  
Nama : Lesko Sihite  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 28 Tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa
4. Informan Tambahan  
Nama : Bertoni A Sihite  
Jenis kelamin : laki- laki  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa
5. Informan Tambahan  
Nama : Rejeki Simanullang  
Usia : 25 Tahun  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Pekerjaan : Petani
6. Informan Tambahan  
Nama : Marolop Sihite  
Jenis kelamin : laki- laki  
Usia : 57 Tahun  
Pekerjaan : Petani
7. Informan Tambahan  
Nama : Marudut Sihite  
Jenis kelamin : laki- laki  
Usia : 75 Tahun  
Pekerjaan : Petani



8. Informan Tambahan

Nama : Rumondang Silaban  
Jenis kelamin : Perempuan  
Usia : 58 Tahun  
Pekerjaan : Petani



Lampiran 3: Pedoman Wawancara

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA TAHUN 2021

(Studi Kasus Di Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)

A. Identitas Informan

1. N a m a : Parluhutan Sihite
2. Jenis Kelamin : Laki Laki
3. Umur :42 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Kepala Desa

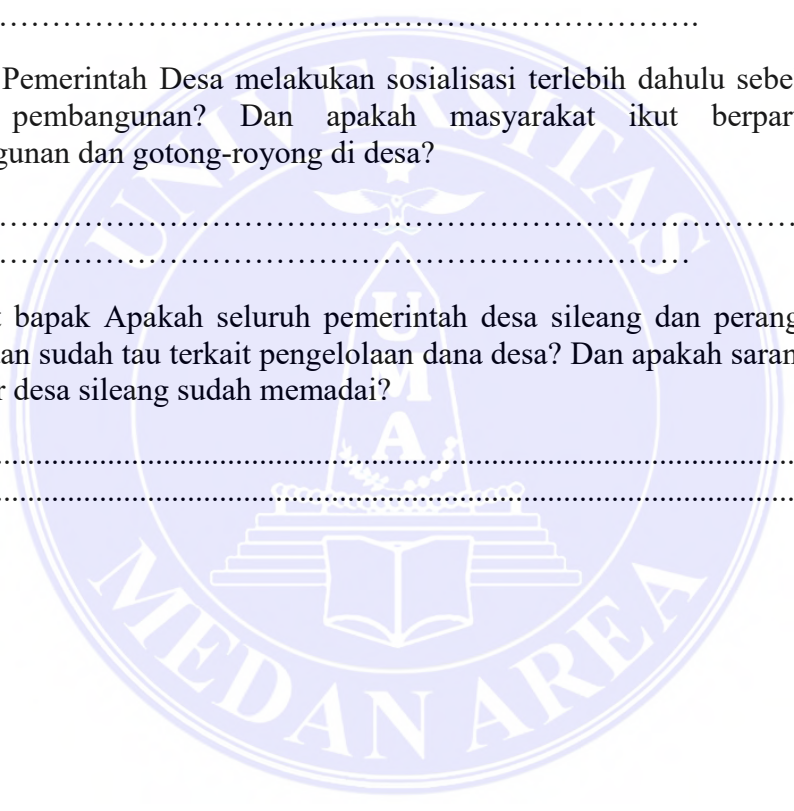
1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?  
.....  
.....
2. Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong-royong di desa?  
.....  
.....
3. Menurut bapak Apakah seluruh pemerintah desa sileang dan perangkat desa sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa? Dan apakah sarana dan prasarana di kantor desa sileang sudah memadai?  
.....  
.....

A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Marusaha Sihite
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 45 Tahun
- 4. Pekerjaan : Perangkat Desa Bagian Kaur Pembangunan
- 5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Kaur Pembangunan

- 1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?  
.....  
.....
- 2. Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong-royong di desa?  
.....  
.....
- 3. Menurut bapak Apakah seluruh pemerintah desa sileang dan perangkat desa sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa? Dan apakah sarana dan prasarana di kantor desa sileang sudah memadai?  
.....  
.....  
.....



A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Lesko Sihite
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 32 Tahun
- 4. Pekerjaan : Perangkat Desa
- 5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Kepala Dusun

- 1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?

.....  
.....  
....

- 2. Menurut bapak Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong-royong di desa?

.....  
.....  
....

- 3. Menurut bapak Apakah seluruh pemerintah desa sileang dan perangkat desa sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa? Dan apakah sarana dan prasarana di kantor desa sileang sudah memadai?

.....  
.....  
....

A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Bertoni A Sihite
- 2. Jenis Kelamin : Perempuan
- 3. Umur : 30 Tahun
- 4. Pekerjaan : Perangkat Desa
- 5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Kepala Dusun

1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?

.....  
.....  
....

2. Menurut bapak Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong-royong di desa?

.....  
.....  
....

3. Menurut bapak Apakah seluruh pemerintah desa sileang dan perangkat desa sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa desa ? Dan apakah sarana dan prasarana di kantor desa sileang sudah memadai?

.....  
.....  
....



A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Rejeki Simanullang
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 23
- 4. Pekerjaan : Petani
- 5. Pendidikan : SMK

B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

- 1. Menurut saudara apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?

.....  
.....  
....

- 3. Menurut saudara Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat desa sileang ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong royong di desa?

.....  
.....

- 4. Menurut saudara Apakah semua Pemerintah Desa atau perangkat desa sileang ini sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa ? dan apakah sarana dan prasarana di desa sileang ini sudah memadai?

.....  
.....  
....

A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Marolop Sihite
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 57 Tahun
- 4. Pekerjaan : Petani
- 5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

- 1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?

.....  
.....  
....

- 5. Menurut bapak Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat desa sileang ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong royong di desa?.....

.....

- 6. Menurut bapak Apakah semua Pemerintah Desa atau perangkat desa sileang ini sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa? dan apakah sarana dan prasarana di desa sileang ini sudah memadai?

.....  
.....  
....

A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Marudut Sihite
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 75 Tahun
- 4. Pekerjaan : Petani
- 5. Pendidikan : SLTA

A. Pertanyaan Kepada Masyarakat

- 1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?  
.....  
.....  
.....
- 2. Menurut bapak Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat desa sileang ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong royong di desa?  
.....  
.....  
.....
- 3. Menurut bapak Apakah semua Pemerintah Desa atau perangkat desa sileang ini sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa ? dan apakah sarana dan prasarana di desa sileang ini sudah memadai?.....  
.....  
.....

A. Identitas Informan

- 1. N a m a : Rumondang Silaban
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3. Umur : 58 Tahun
- 4. Pekerjaan : Petani
- 5. Pendidikan : SLTA

B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

- 1. Menurut bapak apakah pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran dana desa sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahap pengerjaannya?

.....  
.....  
....

- 2. Menurut bapak Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dimulainya proyek pembangunan? Dan apakah masyarakat desa sileang ikut berpartisipasi terkait pembangunan dan gotong royong di desa?

.....  
.....  
....

- 3. Menurut bapak Apakah semua Pemerintah Desa atau perangkat desa sileang ini sudah paham dan sudah tau terkait pengelolaan dana desa ? dan apakah sarana dan prasarana di desa sileang ini sudah memadai?

.....  
.....  
....